

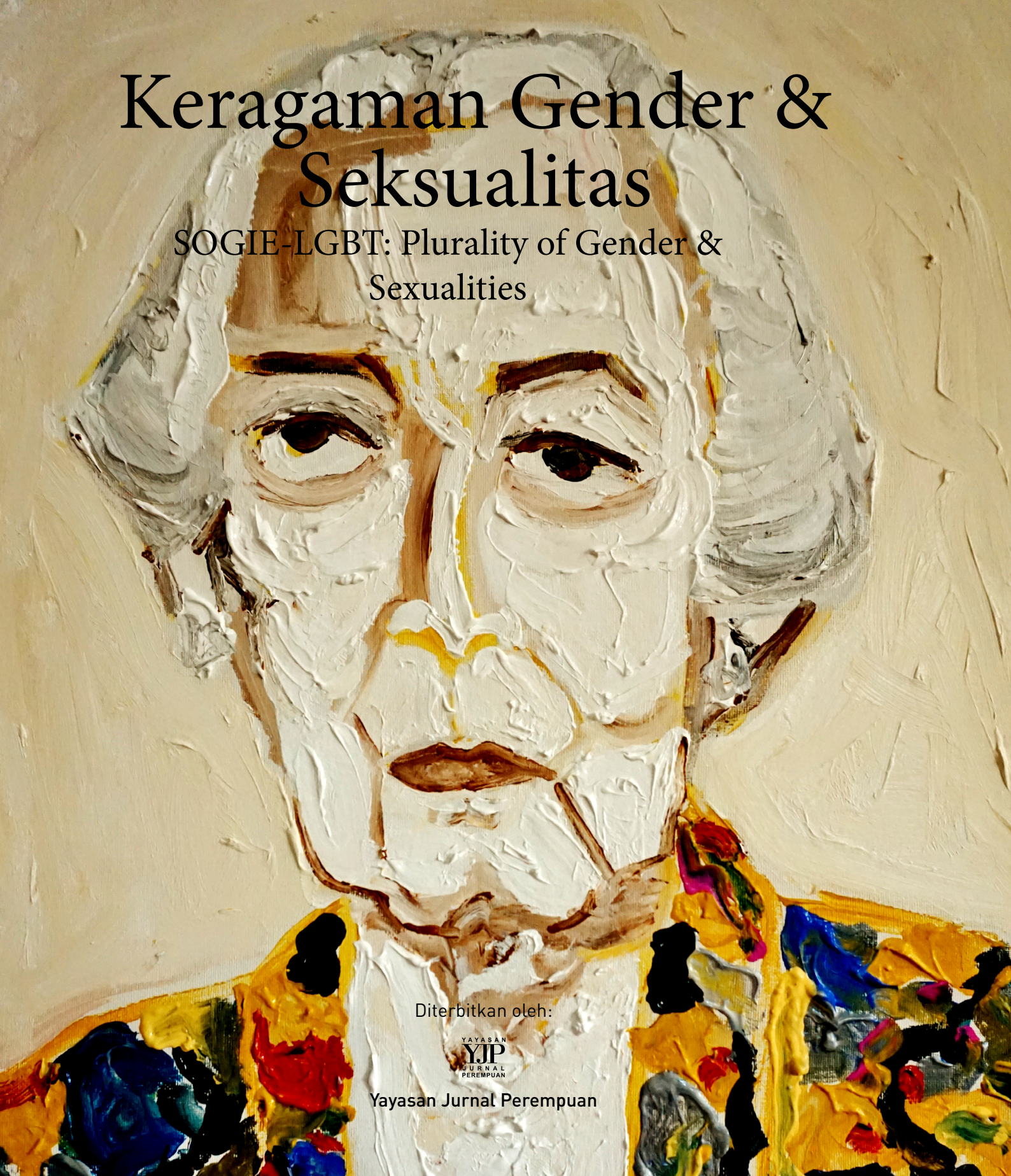
# Keragaman Gender & Seksualitas

SOGIE-LGBT: Plurality of Gender &  
Sexualities

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

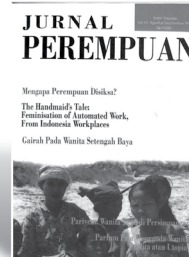
Yayasan Jurnal Perempuan



# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416**

**- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7**

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

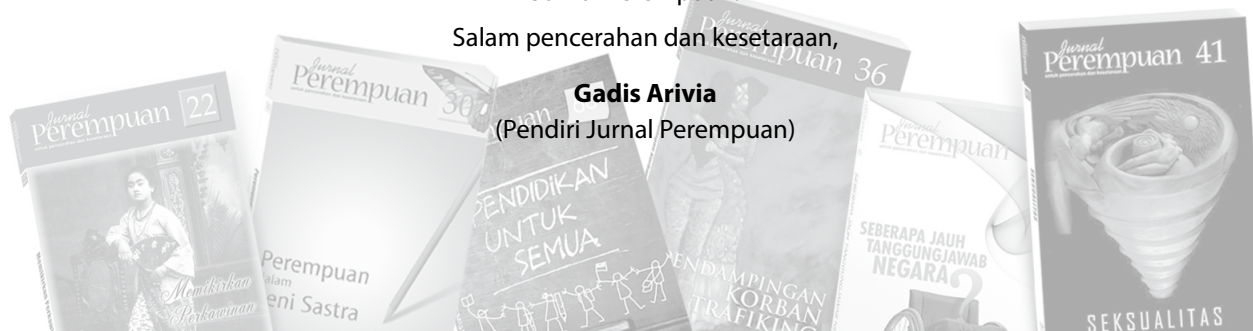
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: [mariana@jurnalperempuan.com](mailto:mariana@jurnalperempuan.com)) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: [deedee@jurnalperempuan.com](mailto:deedee@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

**SEKRETARIS REDAKSI**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan  
Abby Gina Boangmanalu

**DESAIN & TATA LETAK**

Agus Wiyono

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,  
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960  
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)  
Fax: (021) 8370 6747  
Email: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, November 2015



**FORDFOUNDATION**



Ardhanary Institute  
LBT Research, Publishes  
and Advocacy Centre



**Hivos**  
people unlimited

## Daftar Isi

<b>Catatan Jurnal Perempuan:</b> Mengapa SOGIE ( <i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i> )?.....	iii
<b>Artikel / Articles</b>	
• Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE ( <i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i> ) di Nusantara / <i>Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara</i> .....	269-288
<i>BJD. Gayatri</i>	
• Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM ( <i>Female to Male</i> ) di Jakarta / <i>Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta</i> .....	289-302
<i>Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno &amp; Dewi Candraningrum</i>	
• "Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar / "Why I founded Our Voice": a Memoir .....	303-308
<i>Hartoyo</i>	
• Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender <i>Female-to-Male</i> di Indonesia / <i>Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia</i> .....	309-314
<i>Ayu Regina Yolandasari</i>	
• Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia / <i>Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia</i> .....	315-320
<i>Sari Andajani, Dinar Lubis &amp; Sharyn Graham-Davies</i>	
• Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat / <i>Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society</i> .....	321-327
<i>Tanti Noor Said</i>	
• Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer / <i>Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies</i> .....	329-338
<i>Hendri Yulius Wijaya</i>	
• Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia / <i>LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies</i> .....	339-355
<i>Yulianti Muthmainnah</i>	
• LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl / <i>LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts</i> .....	357-366
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• "Makna Hidup" Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta / "Meaning of Life" for LGBT when State Ignores: a Queer Study in Jakarta.....	367-376
<i>Gadis Arivia dan Abby Gina</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
• David Kloos: "Perempuan Konservatif Mendominasi Formasi Kepemimpinan" / <i>David Kloos: "Conservative Women dominate Formation of Leadership"</i> .....	377-381
<i>Saras Dewi</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	383-385
<b>Profil / Profile</b>	
• Hana Salomina Hikayobi: "Terpanggil untuk Menyuarakan Kaum Tak Bersuara" / <i>Hana Salomina Hikayobi: "Compelled to voice the Voiceless"</i> .....	387-392
<i>Dewi Candraningrum &amp; Anita Dhewy</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
• Tombois dan Femmes: Menantang Label Gender di Padang / <i>Tombois and Femmes: Against Gender Label in Padang</i> .....	393-395
<i>Nadya Karima Melati</i>	
<b>Tokoh / Heroine</b>	
• Tunggal Pawestri: "Dukungan Terbuka terhadap LGBT akan Mengundang Dukungan Yang Lain" / <i>Tunggal Pawestri: "Open Support for LGBT invite Other Support"</i> .....	397-404
<i>Anita Dhewy</i>	

# Mengapa SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*)?

**K**omisi Internasional tentang Hak Asasi LGBT (*The International Gay and Lesbian Human Rights Commission* (IGLHRC)) merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang penting dalam menangani dan mengadvokasi isu pelanggaran HAM berbasis SOGIE (*sexual orientation, gender identity and expression*) ke PBB dan berbagai badan internasional lainnya. Organisasi ini tercatat dalam ESOSOC dan menjadikan organisasi untuk konsultasi yang dipercaya PBB, yang didirikan pada tahun 1990 oleh Julie Dorf di San Francisco. IGLHRC juga berkontribusi pada pembuatan Prinsip-Prinsip Yogyakarta (*Yogyakarta Principles*) di tahun 2010. Prinsip-prinsip Yogyakarta adalah prinsip-prinsip legal internasional mengenai orientasi seksual, identitas gender dan Undang-Undang internasional telah disampaikan kepada PBB dan pihak pemerintah dalam upaya memastikan keberadaan universal perlindungan HAM. Kelompok yang terdiri dari 29 ahli HAM internasional hari itu mengeluarkan pernyataan mengenai Prinsip-Prinsip Yogyakarta mengenai Aplikasi Undang-Undang HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender.

Prinsip-Prinsip tersebut menegaskan standar legal mengikat yang wajib dipatuhi oleh semua Negara. Prinsip-prinsip tersebut diadopsi oleh sekumpulan ahli dalam bidang Undang-Undang internasional dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan di Yogyakarta, Indonesia. Anggota kelompok ahli tersebut terdiri dari mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, ahli independen PBB, anggota dan mantan anggota lembaga perjanjian HAM, hakim, akademisi dan pembela HAM. Dalam pengantar aksinya hal 6 dinarasikan: "Kita semua memiliki kesamaan hak asasi manusia. Apapun orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, kebangsaan, ras/etnisitas, agama, bahasa dan status lain yang kita

sandang, kita semua memiliki hak-hak asasi manusia (HAM) tanpa boleh disertai dengan diskriminasi". Pada aksi tersebut diakui dengan jelas keberadaan HAM atas dasar SOGIE.

Seringkali bias kekerasan atas dasar SOGIE dikarenakan mereka dituduh sebagai perihwal baru dan 'barat', yang pada kenyataannya dalam struktur tradisional masyarakat mana pun, akan dapat ditemui dengan mudah eksistensi individu atau kelompok yang memiliki keberagaman gender dan seksualitas. Di Indonesia, di kalangan komunitas Bugis misalnya, bahkan dikenal setidaknya ada lima gender yang berbeda. Yang analog sama adalah *oroane* (laki-laki) dan *makkunrai* (perempuan), dan tiga lainnya disebut sebagai *bissu*, *calabai*, dan *calalai*. *Bissu* mewakili aspek perempuan dan laki-laki, yang menjadi pemimpin spiritual setelah naik haji. *Calabai* mewakili aspek terlahir sebagai laki-laki dan kemudian menjadi perempuan.

Sedang *Calalai* mewakili aspek yang terlahir sebagai perempuan dan kemudian menjadi laki-laki. Di samping tuduhan tersebut, tuduhan yang kerap ada adalah sebutan "sakit jiwa" atas dasar SOGIE mereka, padahal WHO, organisasi kesehatan dunia, telah menyatakan bahwa LGBT bukan fenomena sakit jiwa melainkan varian biasa dari seksualitas manusia.

Kini kita sudah memasuki era komunitas LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer*) yang eksis dan berperan di dalam masyarakat. Namun masalahnya apakah komunitas LGBTIQ telah terrepresentasi secara adil di media? Kevin Barnhurst dalam bukunya berjudul "Media Queered" (2007), menjelaskan bahwa komunitas LGBTIQ telah lama dibungkam di media. Ia mengadvokasi perlunya visibilitas komunitas LGBTIQ di media agar memperlihatkan masyarakat yang plural. Media *mainstream* masih terjebak antara "menertawakan"

kecirian LGBTIQ atau “mengeksotiskan” dan bahkan kadang digambarkan sebagai “predator”. Padahal apa yang perlu dilakukan media adalah memperlihatkan adanya cara berada yang berbeda, unik dan sekaligus mentransformasikan perubahan dan mengikis homofobia (kebencian & ketakutan pada kalangan homo). Kritik terhadap media diperlukan agar media sadar atas ketidakadilan yang terjadi dan ikut memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang mencerahkan. Sesungguhnya tujuan utama dari sensitivitas media terhadap LGBT adalah untuk membangun dialog antara media dan komunitas LGBT dalam menegakkan HAM. Untuk itulah JP Edisi 87 ini diterbitkan.

Dalam bukunya *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (London: Routledge, 1999), Judith Butler menarasikan bahwa “Cultural configurations of sex and gender might then proliferate or, rather, their present proliferation might then become articulable within the discourses that establish intelligible cultural life, confounding the very binarism of sex, and exposing its fundamental unnaturalness. What other local strategies for engaging the ‘unnatural’ might lead to the denaturalization of gender as such?” (hal 190). Butler melemparkan kemungkinan yang melampaui binerisme, pada sesuatu yang kemudian manusia biasa menyebutnya sebagai alamiah. Teori Queer merupakan salah satu persebaran dari teori-teori kritis pos-strukturalis yang lahir pada tahun 1990-an dan disokong secara kuat dalam filsafat feminisme. Di samping Butler, teori ini juga dibangun oleh nama-nama seperti Monique Wittig, Teresa de Lauretis, Lauren Berlant, Leo Bersani, Lee Edelman, Jack Halberstam, David Halperin, Jose Esteban Munoz, Eve Kosofsky Sedgwick, dan lain-lain.

“Bahwa lesbian bukan perempuan” dilontarkan oleh Monique Wittig di tahun 1980 dalam “La Pensée straight” sebagai bagian dari mengurangi kecemasan modernitas dalam menghadapi esensialisme metafisika kehadiran (muasal politik identitas Foucault). Jika Beauvoir menyatakan bahwa seseorang tak terlahir sebagai perempuan, tetapi ‘menjadi’ perempuan; maka Wittig memberikan penekanan pada kata ‘perempuan’: bahwa seseorang

tak terlahir sebagai ‘perempuan’ secara alamiah. Kedua kalimat tersebut sama, tetapi karena penekanan yang berbeda, kemudian menghasilkan makna yang tidak sama dalam diskursus sosial, politik, ekonomi dan terlebih dalam politik linguistik dan politik identitas. Lesbian adalah konsep yang melampaui kategori, bagi Wittig, karena lesbian melampaui identitas laki-laki atau perempuan dalam statusnya atas reproduksi, atas perbudakan dalam keluarga. Sehingga, lesbian bukan perempuan, secara ekonomi, secara politik, secara ideologis. Lesbian sebagai identitas meretaskan dirinya dari identitas yang janggal dari menjadi perempuan, baru kemudian sampai pada lesbian. Atau bahwa lesbian melakukan perjalanan bolak-balik, dari menjadi perempuan, dari menjadi laki-laki, atau sebut saja dengan mudah dari menjadi ‘lesbian’ saja. Ia mengalami dan memikirkan subjektivitas kognitifnya atas ruang konseptual yang amat berisiko dan berbahaya karena ia berada dalam lubang-hitam yang tak diakui dalam diskursus manusia atas ‘dunia’. Sedang bahasa sebagai jalan mediasi, jalan representasi, merupakan ‘alat pembunuh’ pertama atas apa-apa yang berada di luar kategori sebagai ‘berbahaya’.

Diskursus ini dibangun dari pergulatan feminisme dalam melawan ide bahwa gender merupakan entitas esensialis-diri yang dibentuk dan dikonstruksi secara sosial-budaya, yang kemudian melahirkan identitas seksual yang dianggap “alamiah” padahal bukan. Teori ini mendenaturalisasi apa-apa yang normatif dan apa-apa yang disebut sebagai ‘melenceng’ dari kodrat alam. Queer berfokus pada sirkulasi jenis kelamin, gender dan hasrat. Tak hanya itu, ia juga membahas perihal *cross-dressing* (cara berpakaian berbeda dari ‘kodrat’ gender), interseksualitas, ambiguitas gender dan operasi kelamin. Teori ini kurang begitu berkembang dalam kajian-kajian di Indonesia, meskipun telah ada, tetapi tidak sebanyak dalam Kajian Wanita. JP Edisi 87 ini diterbitkan untuk publik luas dengan menarasikan beberapa sejarah gerakan LGBTIQ di Indonesia, disamping juga melakukan penelitian-penelitian paling kontemporer oleh dari atas untuk LGBTIQ. (Pemimpin Redaksi, **Dewi Candraningrum**)

# Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015

## Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

BJD. Gayatri. Aktivis untuk Social Justice, Pendiri Koalisi Perempuan Indonesia, . Pendiri Suara Ibu Peduli, Mantan Penasihat Internasional Asia-Pasifik IGLHRC 1993-1997

### Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression) di Nusantara

#### Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 269-288, 1 gambar, 37 daftar pustaka.

This paper is an overview toward SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression). This charted the history of lesbianism in Indonesia. Approach being used is feminist personal history. There are two approaches in advocacy of human-right based SOGIE. First, the advocacy toward KUHP (product of law) that is based on positive and gender-normative that will endangered the existence of LGBT in Indonesia. Second, SOGIE-activists shall understand fully the plurality of gender and sexuality that is home-grown in Indonesia. This is the best way to advocate the rights as an integral part of Nusantara culture.

Keywords: SOGIE, LGBTIQ, feminist personal history, advocacy.

Makalah ini merupakan pengantar tentang keberagaman gender dalam SOGIE-HAM. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah personal feminis (*feminist personal history*). Paper ini akan mengulas sejarah lahirnya gerakan lesbian di Indonesia. Terdapat dua hal untuk advokasi SOGIE ini. *Pertama* untuk perubahan dan perbaikan Undang-undang sedang terus terjadi di negeri Nusantara yang bhineka ini, misalnya melalui rancangan perubahan KUHP yang saat ini sedang berlangsung, yang akan mengkriminalisasi LGBTIQ, entah karena alasan panik moral atau apa. Dalam kerangka ini para akademisi atau ilmuwan profesi dan kelompok agama yang homofobik juga perlu dicermati. *Kedua*, negeri ini memiliki kekayaan "Keberagaman Gender dan Seksualitas" namun aktivis LGBTIQ, termasuk aktivis perempuan hampir tidak ada yang menggali kekayaan ini, sehingga kita tidak mengenali dan kemudian menjadi terasing dari akar-budaya sendiri.

Kata kunci: SOGIE (Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender), LGBTIQ, sejarah personal feminis, advokasi.

Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum.  
Ardhanary Institute & Jurnal Perempuan.  
ardhanaryinstitute.org

### Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (Female to Male) di Jakarta.

#### Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 289-302, 20 daftar pustaka.

The existence of *Male to Female* (MTF) or in Indonesian word known as Waria is more popular than Female to Male (FTM). Existence of FTM or someone biologically born as woman but identified herself as man is not well-researched and well-documented. That is why this group is difficult to be identified in the public discourse. Jakarta was chosen in this research as this city represented FTM from other areas around

Indonesia. This study found that someone that biologically woman is not otomatically identified herself as woman. The process of self-definition is fluid. In the process of finding the self, FTM faced violences from states, society, work-place, and family.

Keywords: Self, FTM (Female to Male), Sex, Gender, Jakarta.

Eksistensi transgender *Male to Female* (MTF) atau yang secara umum sering kita dengar dengan istilah *Waria* lebih populer dibandingkan dengan transgender *Female to Male* (FTM). Eksistensi FTM atau seseorang yang terlahir secara biologis perempuan tetapi mendefinisikan dirinya sebagai laki-laki belum diangkat dan terdokumentasikan secara baik, sehingga eksistensi FTM sulit dikenali dalam diskursus publik. Pemilihan Jakarta sebagai area penelitian karena merupakan kota urban yang merepresentasikan Indonesia. Responden yang diinterview berjumlah 22 orang, dan di dalam perjalanan penelitian, 5 FTM dari luar Jakarta. Studi FTM ini menemukan bahwa seseorang tidak secara otomatis akan mendefinisikan gendernya sesuai dengan seks/jenis kelamin biologisnya. Mereka membentuk identitas dirinya sendiri secara subjektif melalui proses pendefinisian diri. Dalam perjalanan menuju "diri", FTM mengalami banyak kekerasan baik dari Negara, masyarakat, tempat kerja dan keluarga.

Kata Kunci: Diri, FTM (Female To Male), Seks, Gender, Jakarta.

Hartoyo. Pendiri dan Ketua Suara Kita & Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia  
www.suarakita.org

### "Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar "Why I founded Our Voice": a Memoir

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 303-308, 8 daftar pustaka.

Reformation Era has brought equality to any social movement such as LGBT circle. This era asked and gave opportunity to engage actively in the governance in many ways. Those that entered formal politics, or outside of formal politics such as NGO and community service. LGBT issue is becoming new term in the activism in Indonesia and that is why I established Suara Kita (Our Voice) to celebrate our identity and social justice. This paper narrated the establishment of this organization up to the present time under repression of the society.

Keywords: LGBT, Our Voice, reformation era, social justice.

Harus diakui reformasi membawa angin segar bagi setiap gerakan sosial dalam isu apapun, termasuk kelompok LGBT. Di era reformasi, publik dipaksa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dengan beragam cara. Ada yang masuk ke politik formal, tetapi ada yang memilih di luar jalur atau sistem politik. Semua peluang itu terbuka di era reformasi. Tetapi harus diakui, pada isu LGBT karena gerakan identitas masih relatif baru dalam gerakan sosial, maka peluang reformasi baru bisa ditangkap atau direspons untuk mengangkat isu LGBT dalam wacana publik. Tulisan ini menjelaskan perjalanan Suara Kita sejak berdiri sampai dengan sekarang sebagai organisasi LGBT yang konsisten menyuarakan keadilan sosial.

Kata kunci: LGBT, Suara Kita, era reformasi, keadilan sosial.

Ayu Regina Yolandasari. Women's Studies, Ewha Womans University, Korea Selatan & Ardhany Institute. 52 Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul, South Korea. Phone:+82 2-3277-2114

### **Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender Female-to-Male di Indonesia**

#### **Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 309-314, 13 daftar pustaka.

Sexual violence is a crime in which the victims are usually blamed for being the cause. When it happened to a cisgender heterosexual woman, many people tend to use her appearance and her behavior to justify the victim blaming. It would even be more complicated for lesbian, bisexual women, or female-to-male transgender (LBT). When sexual violence happened to them, their sexual and/or gender identity tend to be added on the reasons to justify the perpetrators' actions. Strangely, in contrast to that, this crime is also usually thought as the cause of their being LBT. This paper is aimed to explore this paradoxical thoughts of sexual violence against LBT, its effects on LBT's lives, and efforts made to break through the paradox itself.

Keywords: LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), sexual violence, Indonesia.

Kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan dimana korban sering kali menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap sebagai penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Ketika kejahatan ini terjadi pada perempuan cisgender heteroseksual, banyak orang yang cenderung menjadikan penampilan dan tingkah laku korban sebagai justifikasi untuk menyalahkannya. Saat kejahatan yang sama terjadi pada lesbian, perempuan biseksual, dan transgender *female-to-male* (LBT), situasinya pun menjadi lebih kompleks, di mana identitas seksual dan/atau identitas gender mereka cenderung dijadikan alasan tambahan untuk menjustifikasi tindakan pelaku terhadap mereka. Anehnya, berlawanan dengan hal tersebut, kejahatan ini juga sering kali dianggap sebagai penyebab seseorang menjadi LBT. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi paradoks terkait kekerasan seksual terhadap LBT, dampaknya pada kehidupan LBT, dan upaya yang dilakukan untuk membongkar paradoks itu sendiri.

Kata kunci: LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), kekerasan seksual, Indonesia.

Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies. Faculty of Health and Environmental Sciences & Faculty of Culture and Society Auckland University of Technology . 55 Wellesley Street East, Auckland Central

### **Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia**

#### **Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 315-320, 31 daftar pustaka.

As a signatory to the Beijing Convention, Indonesia has the responsibility to live up to certain expectations, one of these is to safe guard human rights and the right to freedom of sexuality and access to sexual health. In this article we show this is not the case. In particular, because police are allowed to conduct raids on hotels and people are too scared to be open about their sexuality. As a result of being scared, people are not

able to access sexual health care. Police raids are imposing a sexual morality agenda and the media is exploiting such raids by using horrific pictures, denigrating language maintaining stigmatization. If Indonesia is to get serious about HIV prevention, discrimination against GBV, police raids and violence against LGBT must stop.

Keywords: raids, sexual minorities, LGBT, HIV/AIDS.

Sebagai negara yang menandatangani Konvensi Beijing, Indonesia memiliki mandat dan tanggung jawab untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak warga negaranya akan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, tanpa diskriminasi. Artikel ini menunjukkan bahwa, situasi penegakan hak-hak asasi manusia akan kesehatan seksual dan reproduksi adalah sangatlah jauh dari harapan. Tulisan ini mengangkat wacana akan peran polisi dan masyarakat awam, kelompok *vigilante*, dalam melakukan razia di hotel-hotel dan tempat-tempat yang dinyatakan rentan akan perilaku seksual menyimpang. Yang kesemuanya itu memupuk rasa takut dan mereka kelompok ragam identitas gender dan seksualitas tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. Razia polisi yang diwacanakan sebagai agenda penegakan moralitas masyarakat dan eksploitasi media massa dengan gambar yang seram, tidak santun, bahasa yang melecehkan justru makin melestarikan stigma sosial terhadap kelompok LGBT. Apabila Indonesia mempunyai niat serius dengan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, semua pelecehan terhadap kelompok-kelompok LGBT dan minoritas seksual lainnya haruslah dihentikan.

Kata kunci: razia, minoritas seksual, LGBT, HIV/AIDS.

Tanti Noor Said. Universiteit van Amsterdam. 1012 WX Amsterdam, Netherlands. Phone:+31 20 525 9111

### **Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat**

#### **Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 321-327, 15 daftar pustaka.

This paper attempts to analyze how Indonesian gay males and transgenders male to female in two different social, cultural and political contexts (in Indonesia and Northern Europe) are actively engaged in the making of their own subjectivity. Their subjectivities are entangled with gender, sexuality, religion, romantic love relationships and kinship. They juggle in negotiating and making sense of norms and values of societies that projected towards them. This paper aims to shed light on gender politics of gay and transgender Indonesians in the context of heterosexual hegemony and migration.

Keywords: transnational migration, LGBT activism, gay, transgender.

Tulisan ini menganalisis bagaimana gay dan transgender dalam dua dunia yang berbeda, secara sosial, budaya dan politik, yaitu Indonesia dan Eropa Barat, aktif berpartisipasi dalam pembentukan subjektivitasnya. Subjektivitas gender dalam kajian ini terkait dan tak dapat dipisahkan dari seksualitas, agama, hubungan romantis mereka dengan laki-laki dari Eropa Barat dan tali ikatan persaudaraan mereka dengan keluarga mereka di Indonesia. Mereka berjuang menegosiasikan norma dan nilai masyarakat yang yang diproyeksikan oleh masyarakat terhadap mereka. Kajian ini menyimpulkan bahwa subjektivitas gender dan seksual seseorang yang minoritas ditentukan oleh struktur yang dominan di dalam masyarakat.

Kata kunci: migrasi, transnasional, subjektivitas, aktivisme LGBT, gay, transgender.

---

Hendri Yulius Wijaya. Lee Kuan Yew School of Public Policy,  
National University of Singapore. 469C Bukit Timah Rd,  
Singapore 259772. Phone:+65 6601 2875

## **Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer**

### **Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 329-338, 1 gambar, 1 tabel, 24 daftar pustaka.

This paper examines the complexities of human sexuality by challenging assumptions that have been built on binarism and biological-determinism. This attempt is done by examining the development of sexuality theory and studies from feminism to queer theory, through the lens of some theorists, from Michel Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, to Sara Ahmed. In addition, the development of sexuality studies in Indonesia is also explored, in order to show a myriad of interactions and relations of knowledge between global and local. Queer theory also provides space to criticize the hegemony of existing 'labels' which are originated from the West, and also to show that the meaning and subjectivity shaped by these labels are not always fixed when they are transferred to Indonesian context. For above reasons, this paper introduces the theoretical concept of sex(t)uality—in which sexuality operates like text.

Keywords: Sex, text, queer, global, local, feminism, sex(t)uality.

Makalah ini menganalisis kompleksitas seksualitas manusia dengan menantang asumsi-asumsi yang dibangun atas pemikiran biner yang biasanya memiliki kecenderungan deterministik biologi. Upaya ini dilakukan dengan memaparkan perkembangan teori seksualitas mutakhir, mulai dari feminisme hingga kajian queer, melalui teori-teori Michel Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, hingga Sara Ahmed. Selain itu, perkembangan kajian seksualitas di ranah lokal juga turut dipaparkan untuk melihat bagaimana interaksi dan relasi pengetahuan antara tingkat global dan lokal. Pendekatan teori queer juga memberikan ruang untuk melakukan kritik terhadap hegemoni label seksualitas yang dibawa dari Barat dan menunjukkan bahwa label-label tersebut tidak selalu memiliki makna yang sama dengan asalnya. Inilah alasan mengapa konsep sex(t)uality/ seks(t)ualitas diperkenalkan di sini, bahwa seksualitas beroperasi seperti layaknya teks.

Kata Kunci: Seks, teks, queer, global, lokal, feminisme, sex(t)uality.

---

Yulianti Muthmainnah. Program Studi Diplomasi, Pascasarjana  
Universitas Paramadina. The Energy Tower 22nd Floor, SCBD  
Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

## **Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia1**

### **LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 339-355, 1 tabel, 37 daftar pustaka.

Human rights which were convened by international laws and United Nations is at present universally ideal. However in implementation, this universality was constrained by interior politics, sovereignty, religious interpretation, and culture. Issues of LGBT has received wave of protests internationally and nationally though their rights are guaranteed within laws. Include LGBT issue has been debated on the national and local level. On the other hand, state has responsibility to promote, to protect, and to fulfill human rights for every single person, even people with sexual orientation and gender identity from any harms and violences. This paper will explore how human rights in Indonesia interior politics will protect LGBT groups.

Keywords: human rights, LGBT, interior politics.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disepakati hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara ideal harus bersifat universal. Akan tetapi, dalam implementasinya, atas nama kepentingan dalam negeri, kedaulatan negara, agama, ataupun budaya, keuniversalitasan HAM ini dibatasi oleh negara atau pihak-pihak tertentu, sehingga HAM menjadi relatif dalam pelaksanaannya. Termasuk pada isu LGBT yang masih menuai perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Padahal pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM LGBT menjadi tanggung jawab negara. Tulisan ini akan mengurai bagaimana hak asasi manusia LGBT dilaksanakan dalam kebijakan dalam negeri Indonesia.

Kata kunci: hak asasi manusia, LGBT, politik dalam negeri.

---

Masthuriyah Sa'dan. Solidaritas Perempuan Kinasih & UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Telp:(0274) 589621

## **LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl**

### **LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 357-366, 16 daftar pustaka.

The Fatwa "Haram" of MUI against homosexual orientation (LGBT) and the death penalty against LGBT had shaken the Indonesian, and further marginalized "third" gender people. "Religion" is urged to provide justice to the Ummah but the Ulama did the opposite thing by discriminating sexual minorities. The legal instrument of regional, national and international human rights has recognizes LGBT rights as basic human rights. Islamic religion in this case Shari'ah and Islamic law is used as a theological foundation by MUI to issued the fatwa that is contrary to the concept of human rights. The progressive interpretation of Khaled M. Abou El-Fadl became important to be studied to protect LGBT. Khaled attempted to break up the tension between religion (Islam) and human rights by using the social approach of contemporary humanities. By this means, Abou El-Fadl introduced a scheme of protection to LGBT under Quranic Syariah Law.

Keywords: LGBT, religion, human rights, Khaled M. Abou El-Fadl.

Fatwa "haram" MUI terhadap kelompok homoseksual (LGBT) dan hukuman mati terhadap pelaku seksual "menyimpang" membuat rakyat Indonesia terganggu, khususnya mereka yang merasa memiliki identitas gender "ketiga". "Agama" yang seharusnya memberikan jalan kemudahan, seolah-olah mengubur hidup-hidup seseorang yang memiliki orientasi seksual homo. Padahal, instrumen hukum regional, nasional dan internasional tentang HAM mengakui hak-hak mereka sebagai manusia. Agama Islam dalam hal ini syari'ah dan hukum Islam yang dijadikan landasan teologis fatwa MUI bertolak belakang dengan konsep HAM. Dengan demikian, pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl menjadi penting untuk dikaji. Khaled berupaya meleraikan ketegangan antara agama (Islam) dan HAM dengan menggunakan pendekatan *social humanity contemporary*.

Kata kunci: LGBT, Agama, HAM, Khaled M. Abou El-Fadl.

Gadis Arivia dan Abby Gina. Departemen Filsafat, FIB,  
Universitas Indonesia. Kampus UI Depok Jawa Barat  
16424, Indonesia. Telepon, : +62.21.7270009. Faksimile, :  
+62.21.7270038

**“Makna Hidup” Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian  
Queer di Jakarta**

**“Meaning of Life” for LGBT when State Ignores: a Queer  
Study in Jakarta**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 367-376, 1 gambar,  
9 tabel, 16 daftar pustaka.

This study provides an overview of problems faced by LGBT in Indonesia. There are four issues raised i.e. the meaning of gender and sexual orientation, violence and abuse, the role of the state, and the meaning of happiness. This study uses a sample of 60 respondents living in big cities, especially in Jakarta. However, the strength of this study lies not in the result of the survey, but the result of the in-depth interviews.

From this study it was found that in the context of a conservative state, the respondents are more open through interviews. This study unearths LGBT's meaning of life under the repressive and absence role of the state.

Keywords: LGBT, meaning of life, violence, state.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang persoalan yang dihadapi LGBT di Indonesia. Ada empat isu yang mengemuka yaitu soal makna gender dan orientasi seksual, kekerasan dan pelecehan, peran negara, dan makna hidup bahagia bagi LGBT. Penelitian ini menggunakan 60 sample responden yang hidup di kota besar terutama di Jakarta. Namun, kekuatan dari penelitian ini tidak terletak pada hasil survei melainkan pada hasil wawancara mendalam. Dari penelitian ini ditemukan bahwa para responden, dalam konteks negara konservatif, lebih bisa terbuka lewat wawancara dan bukan lewat pengisian kuesioner. Kajian ini mengungkap makna hidup bagi LGBT di bawah Negara yang represif dan abai pada kelompok minoritas.

Kata Kunci: LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), makna hidup, kekerasan, negara.



**Hana Salomina Hikayobi:**

## “Terpanggil untuk Menyuarakan Kaum Tak Bersuara”

*Hana Salomina Hikayobi: “Compelled to voice the Voiceless”*

**Dewi Candraningrum & Anita Dhewy**

Redaksi Jurnal Perempuan

[dewicandraningrum@jurnalperempuan.com](mailto:dewicandraningrum@jurnalperempuan.com)

**H**ana Salomina Hikayobi adalah perempuan aktivis dari Papua yang lahir pada 7 Juni 1966. Pernah menjadi Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (2005-2010) dan kemudian ditolak oleh Mendagri Gamawan Fauzi menjadi anggota MRP periode 2011-2016 dengan tuduhan makar terhadap NKRI. Hana sangat kritis pada kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua saat itu. Saat menjadi politisi, Hana aktif di Pokja Perempuan MRP (Kelompok Kerja Perempuan Majelis Rakyat Papua) dan bekerja keras mendorong kuota 30% perempuan di parlemen. Sebagai pendiri dan pemimpin Tabloid Suara Perempuan Papua (TSPP), Hana banyak berkorban

untuk sebuah sebab yang lebih besar daripada dirinya. Pembelaan yang gigih terhadap filsafat dan pandangan dunia Papua salah satunya ia suarakan lewat penolakan RUU Anti Pornografi pada saat itu. Melalui TSPP Hana banyak menyuarakan pemertahanan keanekaragaman hayati, penolakan kekerasan terhadap perempuan, pembelaan terhadap pengidap HIV/AIDS dan keadilan HAM bagi Papua. Hana juga membela dengan gigih seorang aktivis Agus Alua yang ditolak oleh Mendagri saat itu untuk menjadi anggota MRP yang memilih mereka berdua secara demokratis. Agus Alua meninggal sebelum pelantikan MRP. Sebelumnya Alua adalah pengurus

Presidium Dewan Papua (PDP), organisasi pro kemerdekaan Papua yang dipimpin Theys Hiyo Alue, yang dibunuh sejumlah anggota Kopassus pada tahun 2000 lalu. Hana banyak merisikokan hidup dan nyawanya demi kecintaannya yang murni pada Indonesia melalui kesetiaan atas Papua. Ia terus melanjutkan perjuangan melalui menulis sebagai salah satu medium suara pergerakan. Sebuah buku, *Kabar dari Kampung: Perjalanan Jurnalistik Suara Perempuan Papua* dikumpulkan Hana pada tahun 2011 sebagai hasil investigasi wartawan TSPP atas pembelaan hak-hak Papua.

### **Tabloid Suara Perempuan Papua dan Upaya Menyuarakan Kaum Tak Bersuara**

Hana Hikayobi memulai kariernya sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS). Empat tahun setelah menyelesaikan kuliah S1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris Universitas Cenderawasih, Hana mengikuti seleksi calon pegawai negeri dan lolos. Ia pun ditempatkan di Lembaga Permasalahanan Anak Kelas IIA Tangerang, Banten dari tahun 1996 hingga 1998. Setelah kembali ke Papua Hana diangkat menjadi PNS dan menjabat sebagai sekretaris pribadi Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Papua dan mengabdikan di Kanwil Dephukham hingga 2005. Ketika menjadi pegawai negeri itulah Hana mendirikan Tabloid Suara Perempuan Papua (TSPP) yang terbit seminggu sekali. Hana bercerita ketika bekerja di Tangerang, ia melihat bagaimana perempuan-perempuan di Jawa sangat maju dan bisa melakukan banyak hal, berbeda dengan perempuan di Papua. Maka ketika kembali ke Papua, Hana menghubungi kawan-kawannya, salah satunya aktivis perempuan Sofia Maipauw Kilmanun yang akrab disapa Poppy. Dari diskusi yang berawal dari dua orang kemudian meluas dan melibatkan teman-teman aktivis dan PNS yang lain, baik perempuan maupun laki-laki. Ia pun menggagas untuk mendirikan sebuah media, sebagai ruang bagi perempuan Papua untuk bersuara. Hana mengungkapkan bahwa gagasan untuk membuat media muncul ketika dalam sebuah perjalanan dari Jakarta ke Papua, ia melihat sebuah media yang kemudian membuatnya berpikir untuk menerbitkan media sebagai sarana untuk menyuarakan persoalan hak-hak perempuan dan anak. Maka selama satu tahun Hana dan kawan-kawannya melakukan persiapan untuk menerbitkan media, mulai dari

konsolidasi, rapat, hingga memanggil instruktur untuk memberikan pemahaman tentang penerbitan media, seperti modal yang dibutuhkan juga isu-isu pemberitaan dan penulisan berita. Hana mengungkapkan *Jurnal Perempuan* juga menjadi inspirasi bagi Tabloid Suara Perempuan Papua. Bahkan pada awal-awal berdirinya TSPP, Hana mengundang Myra Diarsi dan Gadis Arivia (Pendiri *Jurnal Perempuan*) ke Papua untuk memberikan materi-materi terkait penerbitan media. Maka pada 6 Agustus 2004, Tabloid Suara Perempuan Papua akhirnya resmi terbentuk. Hana menuturkan perempuan dan anak menjadi fokus perhatiannya karena mereka termasuk kelompok yang termarginalkan. Keberpihakan pemerintah terhadap perempuan dan anak dalam kebijakan pembangunan dinilai masih minim. Menurutnya jika situasi ini terus dibiarkan dan kita tidak memulai gerakan yang bisa menolong perempuan dan anak, maka ke depan kita akan menuju pada suatu generasi yang kita tidak tahu akan seperti apa. Melihat kondisi semacam itu Hana merasa terpancing untuk berbuat sesuatu karena baginya jika kita bisa melakukan sesuatu hari ini mengapa harus menunggu orang lain. Lewat Tabloid Suara Perempuan Papua Hana bersama sejawatnya mengangkat liputan-liputan khusus tentang perempuan dan anak serta menyelenggarakan pelatihan dan advokasi untuk memengaruhi kebijakan pemerintah agar punya keberpihakan terhadap perempuan dan anak. Hingga hari ini menurut Hana Tabloid Suara Perempuan Papua merupakan satu-satunya media perempuan di Papua yang masih ada. Selain versi cetak, TSPP juga mempunyai versi daring (dalam jaringan/*online*) dan juga menerbitkan buku-buku bertema perempuan.

Selama mengelola TSPP Hana mengaku mempunyai banyak pengalaman menarik. Hana dan TSPP tidak hanya menerbitkan tabloid dan buku tetapi juga melakukan kerja-kerja advokasi. Salah satu pengalaman menarik yang dialami adalah upaya mereka memengaruhi kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura untuk melobi Walikota – yang kebetulan suaminya – agar memperbaiki akses jalan menuju sebuah sekolah yang rusak, tak beraspal dan penuh lumpur serta berlubang-lubang karena jalan tersebut pernah dipakai oleh perusahaan kayu yang kemudian ditinggalkan dalam keadaan rusak parah. Murid sekolah negeri tersebut mayoritas adalah anak-anak Papua. Hana bersama TSPP datang ke sekolah tersebut dan membantu mereka dengan

memberikan buku-buku dan membangun sebuah gedung kecil yang diperuntukkan sebagai perpustakaan. Selain itu ia juga memberikan bantuan berupa makanan tambahan bagi para siswa sekolah tersebut. Keluhan tentang kondisi jalan yang rusak juga disampaikan oleh mama-mama yang biasa berjualan melewati jalan tersebut. Mereka mengadu kepada Hana, "Aduh Hana, kami tidak bisa pergi jual ke pantai, jalan rusak". Karena kondisi tersebut, maka Hana dan teman-temannya menyusun rencana yakni mengundang Kepala Dinas Pendidikan untuk meresmikan taman bacaan di sekolah tersebut. Maka pada hari H Kepala Dinas datang dengan menggunakan mobil dan melewati jalanan yang rusak tersebut. Di tengah perjalanan dia sempat marah karena harus melalui jalan yang rusak. Begitu Kepala Dinas tersebut sampai di sekolah dan melihat dirinya dan Poppy ada di situ, dia pun berujar, "Oh, kamu berdua yang kerjain saya lewat jalan itu". Namun ketika melihat bahwa sekolah tersebut sudah dilengkapi dengan ruangan perpustakaan untuk membaca dengan buku-buku yang sudah tertata rapi, kemarahannya pun surut berganti perasaan haru dan senyum yang mengembang. Ketika Hana memberikan sambutan yang disampaikan di awal acara, Hana mengatakan, "Keringat dan jerih lelah ibu yang sudah berjalan ke sini tentu akan diperhitungkan Tuhan pada jabatan-jabatan yang lebih baik lagi. Ketika hari ini ibu datang kemari dan melihat anak-anak yang harus datang ke sekolah dengan berjalan kaki melalui jalan dengan kondisi yang rusak seperti itu atau mama-mama yang mengangkat barangnya ke pasar dengan melewati jalan yang rusak, kami sangat senang ibu dapat melewati jalan itu dan melihat sendiri kondisinya supaya ketika nanti ibu pulang, ibu dapat memberitahu bapak untuk segera memperbaiki jalan. Sehingga anak-anak yang pergi ke sekolah dapat tertolong begitu juga mama-mama yang hendak berjualan ke pasar". Usai mendengar sambutan Hana, kepala Dinas tersebut langsung bertepuk tangan. Setelah kejadian itu, maka jalan tersebut diperbaiki dan sekitar sebulan kemudian selesai. Sekarang kondisi jalan tersebut sudah beraspal dan bagus. Jalan tersebut juga merupakan akses menuju pantai. Sehingga dengan perbaikan jalan tersebut, maka kawasan itu menjadi tempat pariwisata. Sementara gedung perpustakaan yang mereka bangun masih ada sampai sekarang dan menjadi gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) selain berfungsi sebagai perpustakaan. Hana juga

bercerita tentang sejumlah perjalanan yang mereka lakukan untuk mengantar buku-buku ke kampung-kampung. Mereka menulis buku dan kemudian menjualnya. Dengan dibantu anak-anak yang memikul buku-buku di dalam kardus untuk dibawa dari satu kampung ke kampung yang lain. Lewat bantuan gereja mereka mengantar buku dari satu klasis ke klasis yang lain.

Hana mengungkapkan ada banyak kerja yang dilakukan TSPP, termasuk melakukan advokasi terhadap perempuan-perempuan korban kekerasan dan hal ini dirasakan sebagai tantangan yang cukup besar. Seperti yang terjadi ketika TSPP menyuarakan dan membela hak perempuan dengan menulis kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diduga melibatkan seorang pejabat. Pejabat tersebut menikah dengan perempuan lain atau memiliki istri kedua sementara ia belum bercerai dengan istri pertama. Selain mengangkat kasus tersebut dalam pemberitaan TSPP, Hana dan teman-teman juga melakukan audiensi dengan gubernur dan mendesak gubernur untuk mencopot pejabat tersebut. Ketika TSPP memberitakan kasus tersebut selama beberapa waktu, keluarga/kerabat pejabat tersebut sempat marah saat suatu ketika pernah bertemu dengan wartawan TSPP karena pemberitaan TSPP dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Meskipun demikian, Hana mengatakan hingga kini belum pernah ada yang menantang atau menyerang dirinya secara terbuka dan terang-terangan atas pemberitaan yang diangkat TSPP. Ia pun mengaku selama ini hanya bermodal keberanian dan tidak merasa gentar dengan berbagai kecaman dan ancaman yang ada. Menurut Hana ketika TSPP mengangkat tulisan tentang kekerasan yang dialami perempuan, maka dapat dipastikan akan ada yang memusuhi mereka. Kecaman dan kata-kata pedas kerap dilayangkan pada TSPP. Namun bagi Hana hal tersebut tidak membuatnya takut karena justru mengindikasikan bahwa kritik atau persoalan yang diangkat tabloidnya tepat mengenai sasaran. Walaupun pihak-pihak yang diberitakan TSPP terkait kasus kekerasan terhadap perempuan marah kepada TSPP, namun mereka akan berpikir sepuluh kali bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah salah. Menurut Hana pemberitaan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan media massa dapat dikatakan merupakan semacam "sanksi" sekaligus upaya untuk menyadarkan kaum laki-laki agar menghargai dan menghormati istri

serta menjaga rumah tangga mereka.

Selain perempuan dan anak, Hana memiliki kepedulian yang besar terhadap kelompok marginal, termasuk LGBTIQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, interseks dan queer). Hana mengungkapkan rekan-rekannya di Tabloid Suara Perempuan Papua dekat dengan para waria, karena tiap kali TSPP berulang tahun, mereka juga mengundang waria. Hana menuturkan di Papua gay belum terlalu menonjol, mungkin keberadaan mereka ada namun belum secara terang-terangan muncul di publik. Akan tetapi jika muncul secara terbuka, pasti akan ditentang, sementara waria justru lebih bisa diterima. Hana mengungkapkan mereka ini, para perempuan yang hari ini tidak bisa mendapatkan kursi di legislatif, para perempuan yang mengalami kekerasan, para perempuan yang ada di pasar, dan kelompok marginal lainnya adalah potret kaum yang tak dapat bersuara. Untuk itu menurutnya media massa sebaiknya menyuarakan kaum yang tidak bersuara tersebut.

### **Majelis Rakyat Papua dan Perjuangan Hak-hak Perempuan**

Setelah mendirikan Tabloid Suara Perempuan Papua pada 2004 dan aktif terlibat memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, pada tahun 2005 Hana terpilih menjadi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP). Ketika menjadi anggota MRP, Hana aktif memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik. Ia bercerita dirinya banyak mendapat keluhan dan pengaduan dari para perempuan yang sesungguhnya memiliki keinginan untuk terjun dalam bidang politik dan masuk menjadi anggota legislatif namun kondisi yang ada tidak memungkinkan mereka untuk masuk ke sana. Hal ini mengingat sistem yang ada mengharuskan seseorang yang ingin maju menjadi anggota legislatif memiliki uang yang cukup untuk mendukung proses pencalonannya. Namun realitas di masyarakat memperlihatkan bahwa sebagian besar perempuan tidak mempunyai sumber dana dan uang yang cukup besar untuk mencalonkan diri. Sementara uang merupakan faktor yang cukup berpengaruh. Karena itu Hana bersama koleganya melalui Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan melakukan pendidikan-pendidikan politik. Mereka juga mengadakan pendekatan kepada pimpinan-pimpinan partai, baik di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) maupun dengan pimpinan wilayah di Papua agar memberikan perhatian terhadap perempuan

Papua akan kerinduan mereka untuk dapat masuk ke lembaga legislatif. Hana mengutarakan bahwa partai-partai politik hampir semua dikuasai oleh teman-teman dari luar Papua dan pengurus parpol hampir semua adalah laki-laki, jarang sekali ditemui pengurus partai seorang perempuan. Selain parpol Hana bersama Pokja Perempuan juga mengumpulkan paguyuban dan menjelaskan tentang otonomi khusus juga mengenai kuota keterwakilan perempuan di kursi legislatif maupun eksekutif di Majelis Rakyat Papua. Mereka juga memanggil KPU Provinsi dan berbagi pengalaman mereka untuk mendorong para perempuan Papua di berbagai kabupaten/kota bahkan provinsi untuk terlibat dan masuk di kursi legislatif. Hana berpandangan bahwa kuota 30 persen bagi perempuan hanya ada di syarat, namun belum menjamin keterpilihan perempuan untuk mendapat kursi dan duduk di lembaga legislatif. Karena itu Hana bersama Pokja Perempuan memandang perlu untuk melakukan advokasi, mereka memimpin, berbicara, mengajak partai-partai politik dan para paguyuban, mereka juga mendorong hal tersebut melalui media massa. Tabloid Suara Perempuan Papua ikut serta dalam upaya tersebut dengan mengangkat tulisan mengenai perempuan. Hana bercerita ketika masa kampanye, hampir semua yang memasang baliho yang terpampang di jalan-jalan adalah laki-laki, sedikit sekali yang perempuan Papua. Jika pun ada, hanya satu, dua, karena para perempuan tidak punya uang, sehingga hampir mustahil bagi mereka untuk memasang baliho. Hana mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan tersebut mengadu kepada dirinya, "Ibu, kami tidak bisa pasang baliho, jangan baliho ibu, sekarang partai minta kami bikin, kami mau pasang gimana, kami tidak mampu memberikan uang". Begitulah menurut Hana jerit tangis dari perempuan Papua yang tidak bisa hadir dalam berbagai bidang kehidupan karena mereka tidak kuat secara ekonomi. Pengalaman-pengalaman tersebut membuat Hana berkesimpulan bahwa seseorang harus mempunyai sumber daya ekonomi yang kuat untuk bisa masuk lembaga legislatif.

Meskipun Hana kembali terpilih sebagai anggota MRP periode 2011-2016, namun Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menolak untuk melantik karena tuduhan anti NKRI. Hana menuturkan ketika itu dirinya dengan ditemani Sofia Maipauw Kilmanun (Poppy) bertemu dengan semua pihak, salah satunya dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam

Negeri, Jo Hermansyah Johan. Ia meminta klarifikasi tertulis atas keputusan Mendagri, namun Kemendagri tidak memberikan jawaban secara tertulis. Hana menghendaki jawaban tertulis sebagai bukti yang dapat ia tunjukkan kepada para konstituen yang telah memberikan hak suara kepada dirinya. Hana merasa harus mempertanggungjawabkan segala yang terjadi kepada para konstituennya agar mereka juga tahu alasan Mendagri tidak melantik dirinya. Hana juga mendatangi Kemenko Polhukam, BIN (Badan intelijen Negara) dan BAIS (Badan Intelijen Strategis), DPR RI, DPD RI, bahkan ke Komnas HAM. Hana juga mendatangi Gubernur Papua, namun beliau tidak berani bicara. Ia sudah mendatangi semua pihak, tetapi mereka semua memilih untuk tidak memberikan jawaban. Bahkan hingga hari ini Hana tidak pernah menerima klarifikasi secara tertulis. Tuduhan yang dialamatkan pada dirinya membawa banyak konsekuensi bagi hidupnya. Hana menuturkan setelah dirinya pulang ke Jayapura dari Jakarta, ia mendapati rumahnya sudah ditempel dengan bangunan pos militer dan setiap hari para tentara berlatih di situ, bahkan ada yang datang menyamar dengan bertamu. Hana pun merasa ia tidak bisa lagi tinggal di rumah tersebut dan harus pindah keluar. Bahkan ketika kemudian Hana sudah bekerja sebagai Kepala Bappeda, suatu hari datang orang BAIS ke kantornya dengan menunjukkan kartu identitas dan meminta data-data dirinya. Orang tersebut kemudian selalu terlihat dalam acara-acara di lingkungan pemerintah daerah. Tak kurang keselamatan dirinya juga menjadi taruhan, mobilnya pernah dua kali ditembak, namun beruntung ia tidak sedang berada di dalam mobil ketika penembakan terjadi. Menyikapi tuduhan atas sikapnya yang dinilai anti NKRI, Hana mengutarakan pandangannya bahwa perempuan harus berdiri sebagai aktor damai, melakukan mediasi yang baik terhadap dua kelompok yang punya kepentingan. Ada satu kelompok di sisi rakyat dan ada satu kelompok pemerintah, maka menurutnya mediasi yang baik harus diperankan oleh perempuan dengan baik, sehingga dia menjadi aktor dalam mendukung perubahan, aktor damai dari suatu perubahan yang diinginkan bersama. Hana mengungkapkan, "Kita perempuan tidak mau ada perkelahian, pertumpahan darah dan konflik. Kita mau segala sesuatu, entah itu merahkah, hitamkah, kita perempuan menjadi aktor damai bagi kedua pihak agar mereka berdamai di atas para-para adat yang dihormati bersama". Menurut Hana jika

masing-masing pihak bertahan dengan kemauannya, rakyat dengan kemauan rakyat dan pemerintah dengan kemauan pemerintah, maka tidak akan ada titik temu. Sementara dampak dari kondisi semacam ini akan banyak dirasakan oleh perempuan dan anak. Karena itu perdamaian hendaknya menjadi perjuangan bersama dan perempuan punya peran penting dalam proses tersebut.

Walaupun dirinya batal dilantik, Hana mengaku tidak menyesal ataupun surut dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kaum tertindas, sebaliknya ia terus menjaga semangat dan nafas perjuangannya demi keberpihakannya kepada perempuan Papua. Hana mengaku sempat diberi tawaran bekerja di Jakarta, namun ia tolak. Hana memilih kembali ke Papua dan memulai usaha-usaha yang lain serta menguatkan tabloid. Ketika itu ia kembali berkantor di Tabloid Suara Perempuan Papua dan bekerja. Hana juga mengikuti kursus penjualan ayam potong, sehingga ketika kembali ke Papua ia membuat kandang ayam, beternak dan menjual ayam potong. Sampai hari ini Hana masih menjadi pedagang ayam potong. Di luar usaha barunya tersebut, Hana diangkat menjadi Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. Ia melihat pengangkatan tersebut dapat menjadi pintu untuk menolong perempuan dan anak dari sisi kebijakan sekaligus mengoreksi celah-celah kekurangan yang ada. Setelah berada di dalam, Hana melihat bahwa kebijakan yang ada sudah tegas, tetapi implementasi atau pelaksanaan kegiatan kadang tidak seperti yang diharapkan. Seperti misalnya alokasi dana yang tidak adil bagi perempuan. Hana mencontohkan pembagian dana otonomi khusus seperti diatur dalam perdasus (peraturan daerah khusus) menyebutkan sebanyak 6 persen (berarti 6 miliar) diperuntukkan bagi perempuan, adat dan agama. Dalam realisasinya adat dan agama mendapat alokasi yang besar sementara perempuan hanya mendapat 500 juta. Hana bercerita ketika berlangsung rapat, dirinya tidak diikutkan dalam rapat tersebut dan hanya mendapat informasi dari sekretaris setelah rapat selesai bahwa dari 6 miliar alokasi dana yang ada, perempuan hanya mendapat 500 juta. Hana berpandangan seharusnya masing-masing unsur mendapat alokasi dana yang sama. Maka ia pun kemudian menghadap bupati dan menjelaskan bahwa walaupun raperdasus tidak menyebutkan pembagian persentase secara tegas, tetapi agar adil

maka sebaiknya ketiga unsur, yakni adat, perempuan dan agama masing-masing mendapat 2 miliar. Hana berjuang terus hingga akhirnya perempuan mendapat dana sebesar 1,5 miliar. Contoh-contoh kecil ini menurut Hana memperlihatkan bahwa belum ada keberpihakan yang tegas untuk perempuan. Para pengambil kebijakan masih menganggap remeh perempuan, perempuan dianggap kurang penting dibandingkan adat dan laki-laki. Karena itu Hana pun menyampaikan kepada kepala keuangan bahwa sulit untuk mengubah kondisi masyarakat di kampung jika alokasi dana untuk mereka hanya sebesar 500 juta, sementara tercatat ada 139 kepala keluarga. Maka kemudian Hana berupaya membangun satu perspektif bersama agar ada kesadaran yang tumbuh antar sesama penentu kebijakan sehingga kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan dapat terwujud.

Hana berpandangan bahwa ketika ekonomi kuat dan perempuan mandiri, maka perempuan dapat meraih posisi seperti yang diinginkan, dapat duduk di kursi legislatif, di DPRD, di DPRP, bisa juga menjadi anggota DPD, atau anggota DPR RI. Untuk itu Hana juga berupaya melakukan penguatan ekonomi bagi perempuan dengan mendirikan koperasi untuk menolong perempuan-perempuan korban kekerasan. Dirinya juga mendirikan toko serba usaha dan menjual minyak tanah di salah satu distrik di kabupaten Jayapura. Hana juga mempunyai satu toko di daerah perbatasan Papua Nugini, namun karena ada konflik maka belum ada pembeli di sana. Sehingga barang-barang kembali dikeluarkan dan toko tersebut dikosongkan. Hana mengungkapkan pasar di Papua dikuasai oleh orang Makassar dan Jawa, bahkan dalam satu keluarga si bapak memiliki usaha A, sang mama mempunyai usaha B, sementara

anak perempuannya memiliki usaha C, dan suaminya mempunyai usaha D, dan seterusnya. Sedangkan orang Papua tidak mempunyai tempat, karena masyarakat Papua memiliki tradisi yang berbeda, karena itu sulit bagi mereka untuk berkompetisi dan menjadi pedagang. Menurut Hana orang Papua hanya bisa menjadi penjual, mereka menjual untuk memberi makan dan menghidupi keluarga, bukan untuk berpikir menjadi pedagang atau mencari keuntungan. Akan tetapi tuntutan hari ini mengharuskan orang Papua menjadi pedagang supaya bisa berkompetisi. Hana menuturkan akan sangat sulit bagi perempuan-perempuan Papua yang hanya memiliki modal 50 ribu rupiah untuk berkompetisi dengan orang yang sudah mempunyai modal sebanyak 5 juta hingga 10 juta atau bahkan lebih. Tentu mereka tidak akan mampu bersaing dengan kondisi seperti itu.

### **Penghargaan SK Trimurti, Buah Perjuangan**

Pada 4 September 2015 Hana Salomina Hikayobi mendapat penghargaan SK Trimurti 2015 dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. SK Trimurti Award adalah penghargaan yang diberikan kepada jurnalis atau aktivis perempuan yang berjuang untuk kebebasan pers, kebebasan berekspresi, kesetaraan gender dan hak publik atas informasi. Oleh dewan juri Hana dinilai telah secara konsisten memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan Papua dalam situasi politik dan ekonomi yang berat dan tidak stabil. Dalam pidato singkat usai penyerahan penghargaan Hana mengatakan bahwa penghargaan yang ia terima adalah untuk tanah Papua, untuk perempuan Papua. Penghargaan tersebut juga semakin memperkuat komitmennya pada kaum yang tak bersuara. Selamat, Mama!

### **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
  - Prof. Jeffrey Winters
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
  - Prof. Merlyna Lim
  - Dr. Kristi Poerwandari
  - Dr. Ida Ruwaida Noor
  - Dr. Arianti Ina Restiani
  - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
  - Sari Andajani, PhD.



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:  
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).  
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

<b>Catatan Jurnal Perempuan:</b> Mengapa SOGIE ( <i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i> )?.....	iii
<b>Artikel / Articles</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>) di Nusantara / <i>Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara</i>.....</li> </ul>	269-288
<i>BJD. Gayatri</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (<i>Female to Male</i>) di Jakarta / <i>Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta</i>.....</li> </ul>	289-302
<i>Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno &amp; Dewi Candraningrum</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar / <i>"Why I founded Our Voice": a Memoir</i> .....</li> </ul>	303-308
<i>Hartoyo</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender <i>Female-to-Male</i> di Indonesia / <i>Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia</i>.....</li> </ul>	309-314
<i>Ayu Regina Yolandasari</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia / <i>Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia</i>.....</li> </ul>	315-320
<i>Sari Andajani, Dinar Lubis &amp; Sharyn Graham-Davies</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat / <i>Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society</i> .....</li> </ul>	321-327
<i>Tanti Noor Said</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer / <i>Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies</i>.....</li> </ul>	329-338
<i>Hendri Yulius Wijaya</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia / <i>LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies</i>.....</li> </ul>	339-355
<i>Yulianti Muthmainnah</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl / <i>LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts</i> .....</li> </ul>	357-366
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Makna Hidup" Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta / <i>"Meaning of Life" for LGBT when State Ignores: a Queer Study in Jakarta</i>.....</li> </ul>	367-376
<i>Gadis Arivia dan Abby Gina</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• David Kloos: "Perempuan Konservatif Mendominasi Formasi Kepemimpinan" / <i>David Kloos: "Conservative Women dominate Formation of Leadership"</i>.....</li> </ul>	377-381
<i>Saras Dewi</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	
383-385	
<b>Profil / Profile</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hana Salomina Hikayobi: "Terpanggil untuk Menyuarakan Kaum Tak Bersuara" / <i>Hana Salomina Hikayobi: "Compelled to voice the Voiceless"</i> .....</li> </ul>	387-392
<i>Dewi Candraningrum &amp; Anita Dhewy</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tombois dan Femmes: Menantang Label Gender di Padang / <i>Tombois and Femmes: Against Gender Label in Padang</i>.....</li> </ul>	393-395
<i>Nadya Karima Melati</i>	
<b>Tokoh / Heroine</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tunggal Pawestri: "Dukungan Terbuka terhadap LGBT akan Mengundang Dukungan Yang Lain" / <i>Tunggal Pawestri: "Open Support for LGBT invite Other Support"</i>.....</li> </ul>	397-404
<i>Anita Dhewy</i>	

